PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

LAPORAN TAHUNAN 2023

UPTD PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BANGUNAN DAN GEDUNG

(0751) 7051700 bmcktr@sumbarprov.go.id https://bmcktr.sumbarprov.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Tahunan Perangkat Daerah UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan.

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan Evaluasi dan Pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan Tahun 2023 serta sebagai pertanggungjawaban Kepala UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pembangunan di Bidang ke-PU-an.

Tentunya dalam penyajian Laporan Tahunan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu koreksi, saran dan kritik membangun diperlukan dan menjadi motivasi untuk penyempurnaan Laporan Tahunan ini pada tahun berikutnya, dengan harapan dengan tersusunnya Laporan Tahunan UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Padang, Januari 2024
Kepala UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Provinsi Sumatera Barat

Erfa Putra, S.E., M.M.
Pembina/ IV a
NIP. 19660504 199312 1 001

EXECUTIVE SUMMARY

Penyusunan Laporan Tahunan UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dalam upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kegiatan yang telah dilakukan selama Tahun 2023. Hal ini mengingat pelaporan merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan kepemerintahan yang baik (*good governace)*, sebagaimana termuat dalam Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan *good governace* UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi.

UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat mendapatkan alokasi pendanaan untuk pelaksanaan Program Penataan Bangunan Gedung, Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi, Sub Kegiatan Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi sebesar Rp. 149.533.180,- dengan realisasi anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 146.470.991,- dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 97,95%. Sedangkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah, Sub Kegiatan Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota sebesar Rp. 321.092.520,- dengan realisasi anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 287.992.352,- dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 89,69%.

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR i

EXECUTIVE SUMMARY ii

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR vi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Kedudukan 1

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung 1

1.3. Isu Strategis Pembangunan Infrastruktur dan Utilitas Wilayah 2

1.4. Strategi dan Kebijakan 4

1.5. Program dan Kegiatan 6

BAB II GAMBARAN UMUM 7

2.1. Kelembagaan 7

2.2. Sasaran dan Prioritas Pembangunan 9

2.2.1. Sasaran 9

2.2.2. Prioritas Pembangunan 10

2.3. Tugas dan Fungsi 10

2.3.1. Sub Bagian Tata Usaha 11

2.3.2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian 11

2.3.3. Seksi Layanan Data dan Informasi 12

2.4. Sumber Daya Manusia (SDM) 12

2.5. Peralatan 14

2.5.1. Peralatan Kantor 14

2.5.2. Peralatan Lapangan 14

BAB III KINERJA 16

3.1. Pelaksanaan Program dan Kegiatan 16

3.1.1. Pelaksanaan Program 16

3.1.2. Pelaksanaan Kegiatan 16

3.1.3. Pelaksanaan Sub Kegiatan 16

3.2. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah 17

3.2.1. Permasalahan 17

3.2.2. Upaya Pemecahan Masalah 18

3.3. Realisasi Fisik dan Keuangan 20

3.4. Capaian Kinerja 25

3.5. Pelaksanaan Kegiatan 28

3.6. Penghargaan 31

3.7. Inovasi 31

BAB IV PENUTUP 36

LAMPIRAN 38

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Strategi dan Kebijakan UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan gedung Dinas BMCKTR dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 5
Tabel 2 Personil UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung 9
Tabel 3 Komposisi Pegawai UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung Berdasarkan Tingkat Pendidikan 12
Tabel 4 Komposisi Pegawai pada Sub Bagian Tata Usaha 13
Tabel 5 Komposisi Pegawai pada Seksi Pengawasan dan Pengendalian 13
Tabel 6 Komposisi Pegawai pada Seksi Layanan Data dan Informasi 13
Tabel 7 Peralatan Penunjang Kegiatan 14
Tabel 8 Peralatan Lapangan 15
Tabel 9 Realisasi Fisik dan Keuangan 21
Tabel 10 Uraian Penyerapan Fisik dan Keuangan 23
Tabel 11 Perbandingan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2022 dan 2023 ... 25
Tabel 12 Progress Keuangan dan Progress Fisik 25
Tabel 13 Skala Nilai Peringkat Kinerja 25
Tabel 14 Capaian Indikator Kinerja Output 27
Tabel 15 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Jenis Paket Penyedia 29
Tabel 16 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Jenis Paket Swakelola 30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung 8
Gambar 2 Grafik Komposisi Pegawai UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung Berdasarkan Tingkat Pendidikan 13
Gambar 3 Piagam Penghargaan Tim Multimedia BMCKTR Terbaik 3 Kategori Publikasi Terbanyak Tahun 2023 31
Gambar 4 Tampilan Halaman Utama Aplikasi Situpil 32
Gambar 5 Tampilan Menu Home Aplikasi Mitra Situpil 32
Gambar 6 Tampilan ABeGe Pada Website Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat 33
Gambar 7 Surat Masuk Permintaan Asesmen Bangunan Gedung yang Telah Diunggah Oleh Pemohon Melalui ABeGe 34
Gambar 8 Laporan Hasil Asesmen yang Dapat Diunduh Oleh Pihak Pemohon Melalui ABeGe 34

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Bina Marga, sektor Cipta Karya dan sektor Tata Ruang) yang menjadi kewenangan Daerah.

Salah satu susunan organisasi Dinas yaitu UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung. UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat terdiri dari beberapa struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
4. Seksi Layanan Data dan Informasi; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas diatas, UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung menyelenggarakan fungsi-fungsi:

a. Penyusunan rencana teknis operasional bidang pengawasan dan pengendalian bangunan dan gedung;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang pengawasan dan pengendalian bangunan dan gedung;
c. Pelaksanaan operasional pelayanan pada masyarakat bidang pengawasan dan pengendalian bangunan dan gedung;
d. Pelaksanaan teknis administrasi ketatausahaan UPTD; dan
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.3. Isu Strategis Pembangunan Infrastruktur dan Utilitas Wilayah

UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi Gubernur Sumatera Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yaitu: **“Mewujudkan Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”**.

Sejalan dengan pencapaian visi tersebut, misi Gubernur Sumatera Barat adalah:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah ABS ABK;
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi digital;
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan;
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Mewujudkan tata Kelola pemerintah pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat memegang peranan penting dalam menjalankan Misi Gubernur Sumatera Barat nomor 6

yaitu meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan melalui Sub Kegiatan Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi dan Sub Kegiatan Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kab/Kota.

Pada Sub Kegiatan Bantuan Teknis Pembangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi menyediakan analisa usulan biaya rehabilitasi gedung, pembangunan gedung baru, penilaian tingkat kerusakan bangunan gedung dan penghapusan bangunan gedung. Kesimpulan yang dibuat adalah hasil visual pengukuran dan mencatat nilai indicator, gejala, kondisi bangunan gedung meliputi komponen, unsur, arsitektur, struktur, utilitas, mekanikal dan elektrikal, sarana dan prasarana bangunan gedung serta bahan bangunan gedung terpasang untuk mengetahui kesesuaian atau penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ditetapkan.

Pada Sub Kegiatan Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kab/Kota melaksanakan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, *workshop, Focus Group Discussion* (FGD) bangunan gedung negara. Sub kegiatan ini berpartisipasi dalam rangka membantu program pemerintah untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan/ perundang-undangan yang berlaku. Tujuan lainnya yaitu untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), meningkatkan kapasitas fungsi ASN, dan untuk memberikan pengetahuan baru yang berbasis kompetensi untuk perbaikan pelayanan publik dasar.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat tidak terlepas dari berbagai permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran/ target yang ditetapkan. Permasalahan utama pada Tahun 2023 di UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung adalah kurangnya tenaga teknis, sehingga belum dapat memberikan pelayanan secara optimal dan keterbatasan sarana dan prasarana seperti komputer/ laptop, printer, scanner dan kendaraan roda empat.

1.4. Strategi dan Kebijakan

UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat memiliki peran strategis dan tanggung jawab untuk mendukung pencapaian misi nomor 6 Gubernur Sumatera Barat. Strategi umum yang ditempuh seperti ditampilkan pada table dibawah ini.

Tabel 1 Strategi dan Kebijakan UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan gedung Dinas BMCKTR dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

No.	Misi Gubernur ke-	Tujuan ke-	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	1. Terwujudnya infrastruktur yang handal dan merata	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi	Dukungan terhadap pembangunan infrastruktur strategis nasional	Meningkatnya dukungan terhadap pembangunan infrastruktur strategis nasional
			2. Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Peningkatan pengelolaan tanggap darurat dan pemulihan daerah pasca bencana	1. Meningkatkan sarana dan prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi 2. Pemulihan daerah pasca bencana

Sumber: RPJMD Tahun 2021-2026

1.5. Program dan Kegiatan

Untuk mengaplikasikan strategi dan fokus pekerjaan dituangkan ke dalam program unggulan yaitu:

1. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
2. Program Penataan Bangunan Gedung.

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1. Kelembagaan

Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung, sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dibentuk UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung dengan susunan organisasi terdiri atas :

1. Kepala UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
4. Seksi Layanan Data dan Informasi; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

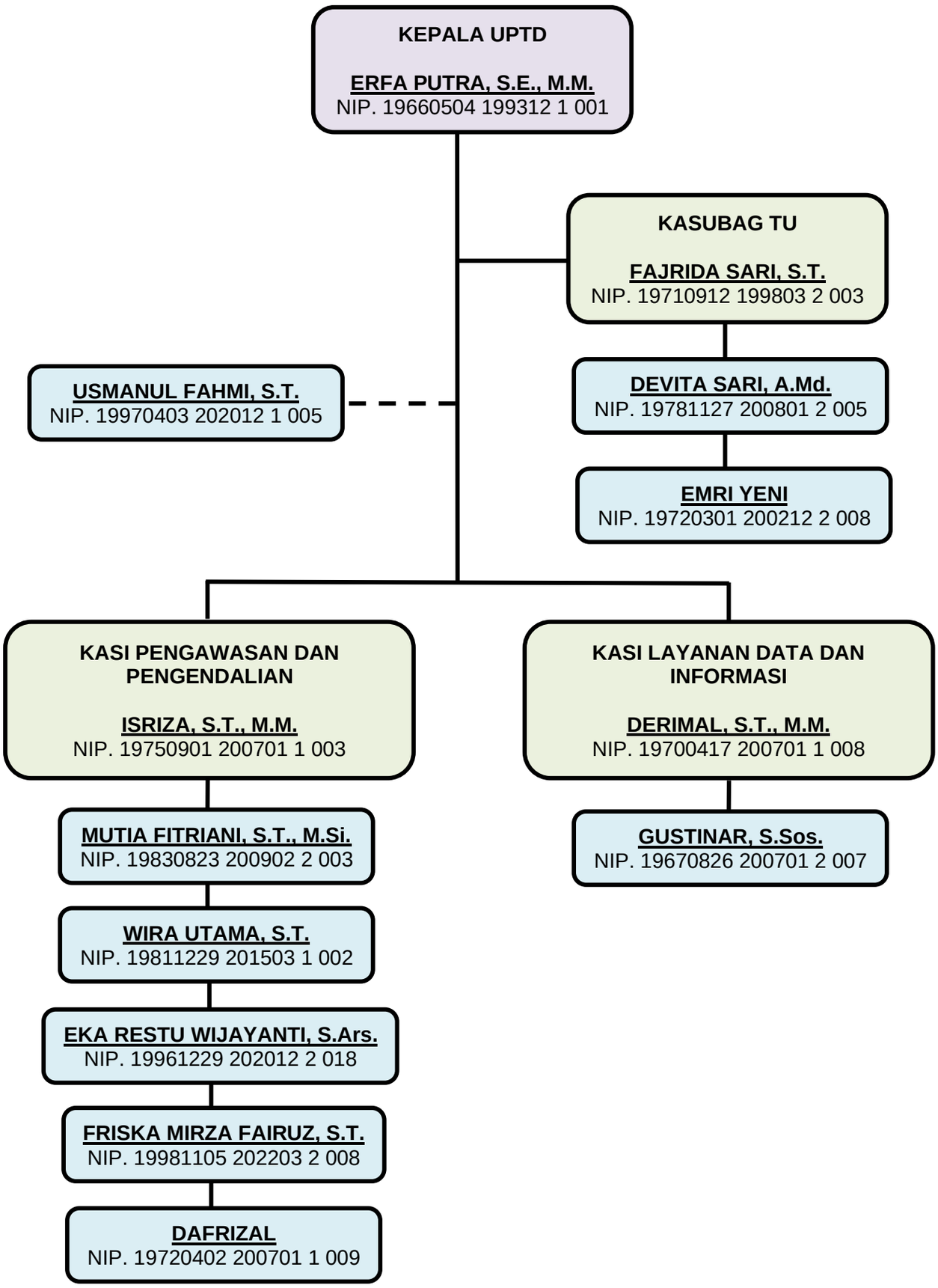

Gambar 1 Struktur Organisasi UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung

Tabel 2 Personil UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Erfa Putra, S.E., M.M.	Kepala UPTD	S1 Manajemen dan S2 Konsentrasi Keuangan
2	Fajrida Sari, S.T.	Kasubag TU	S1 Teknik Sipil
3	Isriza, S.T., M.M.	Kasi Pengawasan dan Pengendalian	S1 Teknik Sipil dan S2 Manajemen
4	Derimal, S.T., M.M.	Kasi Layanan Data dan Informasi	S1 Teknik Sipil dan S2 Manajemen
5	Devita Sari, A.Md.	Pembantu Bendahara Pengeluaran	D3 Manajemen Komputer
6	Mutia Fitriani, S.T, M.Si.	Analis Bangunan Gedung dan Permukiman	S1 Arsitektur dan S2 Perencanaan Pembangunan
7	Wira Utama, S.T.	Penata Bangunan Gedung dan Permukiman	S1 Teknik Sipil
8	Usmanul Fahmi, S.T.	Ahli Pertama – Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	S1 Teknik Sipil
9	Eka Restu Wijayanti, S. Ars.	Analis Bangunan Gedung dan Permukiman	S1 Arsitektur
10	Friska Mirza Fairuz, S.T.	Analis Bangunan Gedung dan Permukiman	S1 Teknik Sipil
11	Gustinar, S.Sos.	Pengadaministrasian Umum	S1 Administrasi
12	Dafrizal	Pengadaministrasian Umum	SMA
13	Emri Yeni	Pengadaministrasian Umum	SMA

2.2. Sasaran dan Prioritas Pembangunan

2.2.1. Sasaran

Sasaran program yang dilaksanakan UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 yang disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, yaitu Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Bangunan Gedung Strategis.

2.2.2. Prioritas Pembangunan

Skala prioritas pembangunan tahun 2023 terletak pada Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota yang melakukan sosialisasi, bimtek, *workshop,* dan FGD bangunan gedung negara dan Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang melakukan asesmen bangunan gedung negara yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas bangunan gedung strategis.

2.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana teknis operasional bidang pengawasan dan pengendalian bangunan dan gedung;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang pengawasan dan pengendalian bangunan dan gedung;
3. Pelaksanaan operasional pelayanan pada masyarakat bidang pengawasan dan pengendalian bangunan dan gedung;
4. Pelaksanaan teknis administrasi ketatausahaan UPTD; dan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.3.1. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung.

Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi:

1. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, hukum dan kearsipan;
2. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
3. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
4. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
5. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.3.2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas mengelola dan melaksanakan kegiatan penunjang pekerjaan Dinas pada Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan gedung.

Uraian tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian meliputi:

1. Menyiapkan/Menyusun program kerja bidang pengawasan dan pengendalian;
2. Melaksanakan pengawasan bangunan/gedung sesuai kaidah dan standar bangunan;
3. Melaksanakan pengendalian bangunan/gedung agar sesuai perizinan dan rencana pembangunan;
4. Melaksanakan pelayanan advokasi dan penyelesaian permasalahan bangunan/gedung;
5. Melaksanakan asesmen bangunan/gedung untuk penilaian layak fungsi;
6. Melaksanakan penilaian dan analisa bangunan/gedung untuk dihapuskan;
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.3.3. Seksi Layanan Data dan Informasi

Seksi Layanan Data dan Informasi mempunyai tugas menyediakan data dan informasi serta memberikan layanan konsultasi tentang bangunan dan gedung bagi masyarakat atau pihak lainnya.

Uraian tugas Seksi Layanan Data dan informasi meliputi:

1. Menyiapkan/Menyusun program kerja layanan daya dan informasi;
2. Melaksanakan layanan konsultasi data/informasi tentang bangunan/gedung baik teknis maupun teknologi konstruksi;
3. Melaksanakan pameran/sosialisasi teknologi terapan yang berkembang secara dinamis;
4. Melakukan penyebarluasan informasi teknologi bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan dan gedung;
5. Melaksanakan pemeliharaan data/informasi serta alat-alat studio informasi bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan dan gedung; dan
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.4. Sumber Daya Manusia (SDM)

Berdasarkan data yang tercatat pada Sub Bagian Tata Usaha Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, pegawai pada UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung pada Tahun 2023 sejumlah 13 (tiga belas) orang berstatus PNS, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3 Komposisi Pegawai UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Strata 2 (S-2)	4
2.	Strata 1 (S-1)	6
3.	Diploma 3 (D-3)	1
4.	SMA	2

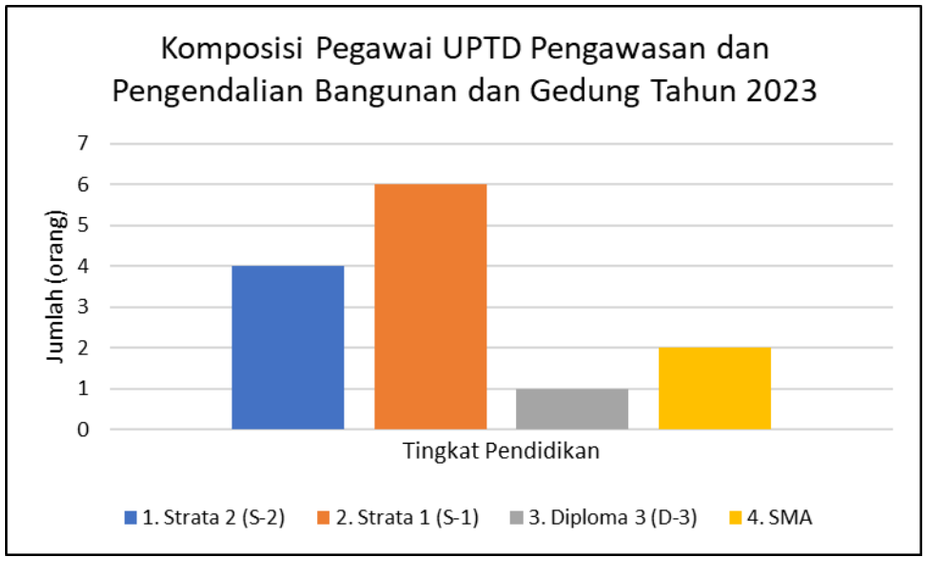

Gambar 2 Grafik Komposisi Pegawai UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 4 Komposisi Pegawai pada Sub Bagian Tata Usaha

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Strata 1 (S-1)	1
2.	Diploma 3 (D-3)	1
3.	SMA	1

Tabel 5 Komposisi Pegawai pada Seksi Pengawasan dan Pengendalian

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Strata 2 (S-2)	2
2.	Strata 1 (S-1)	4
3.	SMA	1

Tabel 6 Komposisi Pegawai pada Seksi Layanan Data dan Informasi

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Strata 2 (S-2)	1
2.	Strata 1 (S-1)	1

2.5. Peralatan

Peralatan yang menunjang kegiatan operasional dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu peralatan penunjang kegiatan dikantor dan dilapangan.

2.5.1. Peralatan Kantor

Sarana pengolahan data yang diadakan meliputi komputer dan perlengkapannya dengan tujuan utama menunjang operasional kegiatan kantor.

Tabel 7 Peralatan Penunjang Kegiatan

No.	Nama Unit/Barang	Merek	Kondisi			Jumlah	Set.
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat		
1.	Lemari Kayu	-	1	-	-	1	Buah
2.	Meja Kayu/ Meja Tulis	Modera Furniture	18	-	-	18	Buah
3.	Laci Kayu	Modera Furniture	13	2	-	15	Buah
4.	Kursi Kayu	-	8	-	-	8	Buah
5.	White Board	-	1	-	-	1	Buah
6.	Printer	Laserjet Pro MFP, Epson	2	1	1	4	Unit
7.	Lemari Kaca	-	5	-	-	5	Buah
8.	Kursi Tamu	Futura	8	-	-	8	Buah
9.	Komputer	Asus, HP, Lenovo	2	-	1	3	Unit
10.	Kursi Putar	-	5	10	2	17	Buah
11.	Meja Rapat	Modera Furniture	2	-	-	2	Buah
12.	LCD Proyektor	Epson	1	-	-	1	Unit

2.5.2. Peralatan Lapangan

Peralatan untuk menunjang lapangan yang ada masih kurang dan beberapa sudah tidak berfungsi sehingga perlu diadakan lagi. Pengadaan peralatan khususnya untuk keperluan pengukuran langsung dilapangan.

Tabel 8 Peralatan Lapangan

No.	Nama Unit/Barang	Merek	Kondisi			Jumlah	Set.
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat		
1.	Rol Meter	Krisbow	1		1	2	Buah
2.	Papan Kerani	-			2	2	Buah
3.	Meter Laser	Krisbow	2			2	Buah
4.	Kendaraan roda 4	Innova	1			1	Unit

BAB III KINERJA

3.1. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

3.1.1. Pelaksanaan Program

Ada beberapa program yang ditargetkan di UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung meliputi:

1. Program 1.03.08 (Program Penataan Bangunan Gedung)
2. Program 1.03.09 (Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya)

3.1.2. Pelaksanaan Kegiatan

Adapun pelaksanaan kegiatan pada UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung adalah merupakan bagian dari pelaksanaan program yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi.
2. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

3.1.3. Pelaksanaan Sub Kegiatan

Adapun pelaksanaan sub kegiatan pada UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung adalah merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi.

   Sub Kegiatan Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi menitikberatkan pada analisa kebutuhan biaya bangunan gedung negara dan tingkat kerusakan bangunan gedung sekolah. Kegiatan tersebut meliputi:

   a. Penilaian Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
   b. Penilaian Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara;
   c. Penilaian Penghapusan Bangunan Gedung Negara;
   d. Penilaian Dana Alokasi Khusus Dinas Pendidikan untuk Bangunan Gedung Sekolah.

2. Sub Kegiatan Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

   Sub Kegiatan Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota diadakan sebanyak 2 (dua) kali kegiatan, yaitu:

   a. Bimbingan Teknis Pengawas Konstruksi Bangunan Gedung pada Hari Selasa s.d Kamis tanggal 29 s.d 31 Agustus 2023, bertempat di Hotel Grand Bunda Syariah Jl. Ahmad Karim No. 17 Kota Bukittinggi, Sumatera Barat.
   b. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PBG dan SLF pada hari Rabu s.d Jumat tanggal 06 s.d 08 Desember 2023, bertempat di Hotel Santika Bukittinggi Jl. Tuanku Nan Renceh No. 33 Bukittinggi, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat.

3.2. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

3.2.1. Permasalahan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat tidak terlepas dari berbagai permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran/ target yang ditetapkan. Permasalahan dan kendala tersebut adalah:

3.2.1.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Terbatasnya tenaga teknik yang bersertifikasi baik di UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung maupun di Bidang Cipta Karya, sehingga dalam memberikan pelayanan asesmen belum dapat secara optimal.
b. Minimnya fasilitas peningkatan kemampuan staf, seperti training dibidang teknik dan administrasi perkantoran.

3.2.1.2. Prasarana Pendukung Kerja

a. Terbatasnya prasarana transportasi untuk Para Kepala Seksi dan Staf yang digunakan untuk survey ke lapangan. Para Kepala Seksi tidak memiliki kendaraan dinas baik roda 2 maupun roda 4 yang memadai, sehingga respon untuk tindak lanjut pekerjaan sering terlambat.
b. Minimnya jumlah komputer, printer dan scanner di ruangan.

c. Terbatasnya alat yang dibutuhkan untuk ke lapangan seperti meteran, papan dan kamera, sehingga menghambat tim asesmen untuk dapat melakukan survey ke lapangan.

3.2.1.3. Anggaran/Pendanaan

a. Dengan terbatasnya ketersediaan anggaran pada UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung dan banyaknya permintaan asesmen dari OPD/K/L di Provinsi Sumatera Barat, sehingga masih ada permintaan asesmen yang belum terpenuhi.

3.2.1.4. Kegiatan

a. Dengan berkembangnya IPTEK pada pelaksanaan bangunan gedung, sehingga dibutuhkan peningkatan SDM pada dinas teknis di kab/kota, maka adanya permintaan di kab/kota untuk dilaksanakannya bimtek/sosialisasi/workshop dalam upaya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang diharapkan.
b. UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung merupakan bagian dari Bidang Cipta Karya, karena keterbatasan alokasi anggaran saat ini tupoksi UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung hanya fokus untuk bangunan gedung saja, sementara pada Bidang Cipta Karya terdapat kegiatan air minum dan sanitasi.
c. Dalam pelaksanaan kegiatan bimtek terjadi perubahan metode pembelajaran yang semula luring menjadi daring, hal ini disebabkan karena penyesuaian *schedule* narasumber dari Kementerian PUPR.

3.2.2. Upaya Pemecahan Masalah

Adapun upaya pemecahan masalah yang akan dilakukan UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam mengatasi permasalahan dan kendala adalah:

3.2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Mengusulkan penambahan staf tenaga teknik kepada Sekretariat Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.
b. Mengusulkan kepada Sekretariat Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat untuk proaktif

dalam pembinaan staf baik dibidang teknik maupun dibidang administrasi perkantoran.

3.2.2.2. Prasarana Pendukung Kerja

a. Guna mendukung kegiatan UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung perlunya penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan seperti kendaraan roda 4, komputer, printer, scanner, meteran, papan, kamera dan lainnya.

3.2.2.3. Anggaran/Pendanaan

a. Diperlukannya penambahan anggaran yang diajukan pada saat anggaran perubahan, namun sebelum adanya anggaran perubahan biaya transportasi dan perjalanan dinas ditanggung oleh pemohon yang mengajukan permintaan asesmen.

3.2.2.4. Kegiatan

a. Diperlukannya penambahan penyelenggaraan kegiatan bimtek/sosialisasi/workshop untuk kab/kota guna meningkatkan SDM khususnya dalam pengelolaan bangunan gedung.
b. UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung merupakan bagian dari Bidang Cipta Karya, diharapkan kedepannya untuk pembinaan teknis tidak hanya fokus ke bangunan gedung saja, namun juga kegiatan air minum dan sanitasi.
c. Perlunya koordinasi lebih awal untuk kegiatan pembinaan teknis ke Kementerian PUPR untuk permintaan sebagai narasumber, mengingat padatnya jadwal narasumber untuk kegiatan tersebut diatas.

3.3. Realisasi Fisik dan Keuangan

Berdasarkan DPA UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung Nomor: DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 6 Januari 2023, DPA Pergeseran Nomor: DPPA/A.2/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 17 April 2023 dan DPA Perubahan Nomor: DPPA/B.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 20 November 2023, bahwa secara umum progress fisik dan keuangan pada UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung disajikan seperti berikut:

Tabel 9 Realisasi Fisik dan Keuangan

No.	Program/Kegiatan		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Progress %		Sisa Anggaran	
					Keuangan	Fisik	Rp.	%
1.	Program Penataan Bangunan Gedung	Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sub Kegiatan Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	149.533.180	146.470.991	97,95	100	3.062.189	2,05

No.	Program/Kegiatan		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Progress %		Sisa Anggaran	
					Keuangan	Fisik	Rp.	%
2.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota Sub Kegiatan Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota	321.092.520	287.992.352	89,69	100	33.100.168	10,31

Tabel 10 Uraian Penyerapan Fisik dan Keuangan

No.	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Penyerapan Keuangan (Rp.)	Progress Keuagan	Progress Fisik
1.	**Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi**	**149.533.180**	**146.470.991**	**97,95%**	**100%**
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	15.766.680	13.818.549	87,64%	100%
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	3.669.200	3.669.200	100%	100%
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	1.764.800	1.764.800	100%	100%
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	8.250.000	8.250.000	100%	100%
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	200.000	200.000	100%	100%
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	1.071.000	1.071.000	100%	100%
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	150.000	150.000	100%	100%
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	11.137.500	10.649.442	95,62%	100%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.124.000	5.073.000	99%	100%
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	102.400.000	101.825.000	99,44%	100%
2.	**Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota**	**321.092.520**	**287.992.352**	**89,69%**	**100%**
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.116.000	7.116.000	100%	100%
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	6.790.600	6.477.100	95,38%	100%
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	2.239.300	2.239.300	100%	100%
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	8.610.000	8.610.000	100%	100%

No.	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Penyerapan Keuangan (Rp.)	Progress Keuagan	Progress Fisik
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	300.000	300.000	100%	100%
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	1.846.500	1.846.500	100%	100%
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	300.000	300.000	100%	100%
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Suvenir/Cendera Mata	9.100.000	9.100.000	100%	100%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.065.000	8.178.000	81,25%	100%
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	31.100.000	25.800.000	82,96%	100%
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	-	-	-	-
	Honorarium Rohaniwan	400.000	400.000	100%	100%
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	47.527.120	40.497.238	85,21%	100%
	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	4.400.000	4.400.000	100%	100%
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	-	-	-
	Belanja Paket/Pengiriman	-	-	-	-
	Belanja Sewa Hotel	106.826.000	104.600.000	97,92%	100%
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	84.472.000	68.128.214	80,65%	100%
Total		**470.625.700**	**434.463.343**	**92,32%**	**100%**

Jika dibandingkan dengan realisasi fisik dan keuangan Tahun Anggaran 2022, terlihat bahwa Tahun Anggaran 2023 penyerapan fisik dan keuangan mengalami penurunan dan kenaikan, dapat dilihat seperti berikut:

Tabel 11 Perbandingan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2022 dan 2023

No.	Sub Kegiatan	Realisasi (%)	Tahun Anggaran		Deviasi	Keterangan
			2022	2023		
1.	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Keuangan	97,52	97,95	0,43	Kenaikan 0,43%
		Fisik	100	100	-	-
2.	Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota	Keuangan	92,51	89,69	(2,82)	Penurunan 2,82%
		Fisik	100	100	-	-

3.4. Capaian Kinerja

Kinerja seringkali tidak terlepas dari produktivitas, batasan tentang kinerja adalah sebagai suatu catatan hasil (output) yang dihasilkan dari suatu fungsi pekerjaan atau kegiatan selama suatu periode tertentu.

Tabel 12 Progress Keuangan dan Progress Fisik

No.	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Penyerapan Keuangan (Rp.)	Progress Keuagan	Progress Fisik
1.	**Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi**	**149.533.180**	**146.470.991**	**97,95%**	**100%**
2.	**Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota**	**321.092.520**	**287.992.352**	**89,69%**	**100%**
Total		**470.625.700**	**434.463.343**	**92,32%**	**100%**

Tabel 13 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Untuk menghitung besaran persentase capaian kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\%\ capaian\ kinerja = \frac{realisasi}{target} x100$$

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target indikator kinerja pada Tahun 2023. Hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tat Ruang Provinsi Sumatera Barat serta menjelaskan atas keberhasilan dan kegagalannya. Capaian Indikator Kinerja Output dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 14 Capaian Indikator Kinerja Output

No.	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Capaian Indikator Kinerja Output			% Capaian
				Uraian	Target	Realisasi	
1.	Penataan Bangunan Gedung	Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sub Kegiatan Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Bangunan Gedung Strategis	Jumlah Asesmen Bangunan Gedung Negara	50 Dokumen	117 Dokumen	234%
2.	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota Sub Kegiatan Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota		Jumlah Sosialisasi, Bimtek, Workshop dan FGD Bangunan Gedung Negara	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

Catatan : Pada Program Penataan Bangunan Gedung, Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan StrategisDaerah Provinsi, Sub Kegiatan Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi ditargetkan 50 dokumen dan terealisasi sebanyak 117 dokumen, ini disebabkan karena sebagian kegiatan asesmen bangunan gedung negara dibiayai oleh Pemohon.

3.5. Pelaksanaan Kegiatan

UPTD Pengawasn dan Pengendalian Bangunan dan Gedung Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat mempunyai 4 paket kegiatan, dengan rincian 2 paket kegiatan penunjukan langsung dan 2 paket kegiatan swakelola. Rincian laporan pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 15 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Jenis Paket Penyedia

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan/Paket	APBD Perubahan (Rp.)	Jenis Paket	Metode	Penyedia	No. Kontrak	Jangka Waktu Pelaksanaan (hari kalender)	Realisasi				
								Keuangan			Fisik	
								Realisasi (Rp.)	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG											
A.	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**											
	KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH											
I.	**Sub Kegiatan Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota**											
1.	Kegiatan Bimbingan Teknis Pengawas Bangunan Gedung	53.163.000	Penyedia	PL	PT. Bunda Empat Pilar/Grand Bunda Hotel	01/SPK-HTL/P2BG-BMCKTR/VIII-2023	3 hari	52.470.000	100	98,70	100	100
2.	Kegiatan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PBG dan SLF	53.663.000	Penyedia	PL	PT. Pesona Indonesia Mulia/Hotel Santika Bukittinggi	02/SPK-HTL/P2BG-BMCKTR/XII-2023	3 hari	52.130.000	100	97,14	100	100
	Total	**106.826.000**						**104.600.000**				

Tabel 16 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Jenis Paket Swakelola

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan/Paket	APBD Awal (Rp.)	Jenis Paket	Jangka Waktu Pelaksanaan (hari kalender)	Realisasi				
					Keuangan			Fisik	
					Realisasi (Rp.)	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG								
A.	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**								
	KEGIATAN PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI								
I.	**Sub Kegiatan Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi**								
1.	Swakelola Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	149.533.180	Swakelola	360	146.470.991	100	97,95	100	97,95
B.	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**								
	KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH								
I.	**Sub Kegiatan Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota**								
1.	Dana Penunjang Kegiatan/Administrasi Proyek	214.266.520	Swakelola	360	183.392.352	100	85,59	100	85,59
	Total	**363.799.700**			**329.863.343**				

3.6. Penghargaan

Sebagai wujud kinerja nyata urusan pekerjaan umum, UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat memperoleh penghargaan, yaitu:

Gambar 3 Piagam Penghargaan Tim Multimedia BMCKTR Terbaik 3 Kategori Publikasi Terbanyak Tahun 2023

3.7. Inovasi

Pencapaian sasaran UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat tidak terlepas dari inovasi-inovasi dalam memberikan pelayanan publik urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Pada Tahun 2023 inovasi yang dilaksanakan pada UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung adalah:

1. Situpil (Sistem Tukang Terampil)

   Aplikasi Situpil Sistem Tukang Terampil) adalah sebuah aplikasi yang dapat memudahkan masyarakat di Sumatera Barat yang membutuhkan tukang terampil kerja untuk kebutuhan konstruksi. Aplikasi Situpil digunakan oleh masyarakat, sedangan aplikasi Mitra Situpil adalah aplikasi yang dapat memudahkan dari sisi tukang terampil untuk menerima permintaan tukang dari masyarakat yang ada di Sumatera Barat.

   Dengan adanya aplikasi ini diharapkan bisa menjadi penghubung antara konsumen yang membutuhkan tenaga tukang dengan tukang yang sudah tersertifikasi keahliannya. Aplikasi Situpil Plus dan Mitra Situpil ini berbasis android yang sudah dapat didownload melalui playstore dengan keyword : Situpil Sumbar dan Mitra Situpil Sumbar.

Gambar 4 Tampilan Halaman Utama Aplikasi Situpil

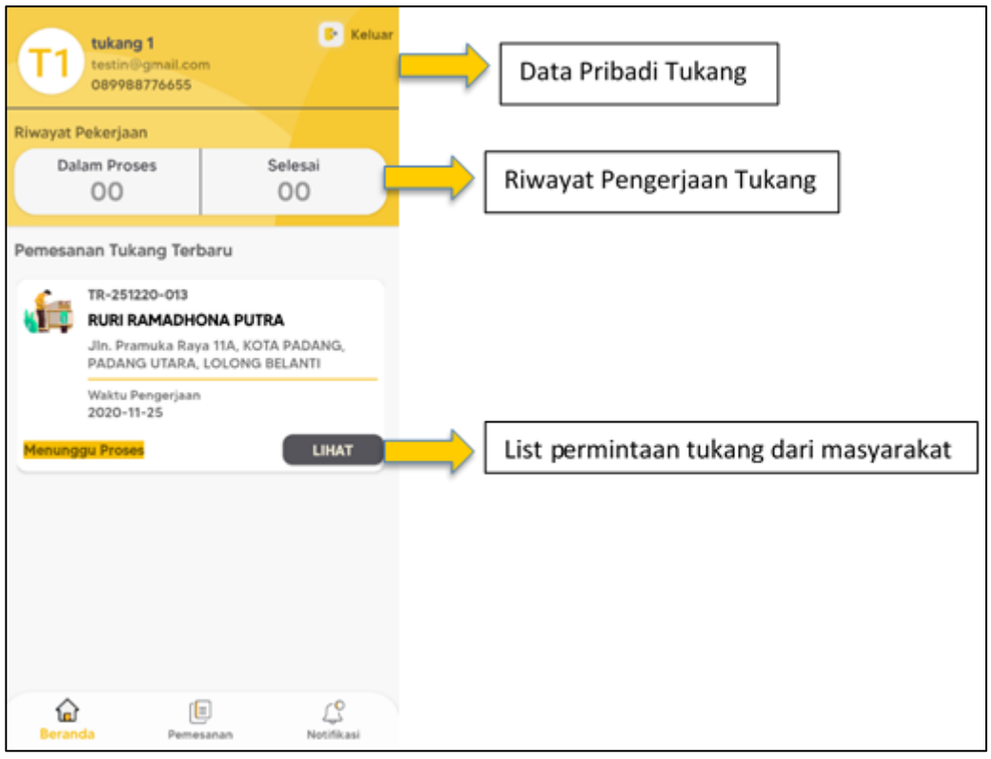

Gambar 5 Tampilan Menu Home Aplikasi Mitra Situpil

2. ABeGe (Asesmen Bangunan Gedung)

UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di Bidang Cipta Karya Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat.

Permasalahan utama yang dihadapi saat ini adalah dalam hal pengelolaan kegiatan asesmen bangunan gedung negara, dimana pelaksanaan kegiatan tersebut dimulai dari surat permintaan sampai dengan laporan hasil asesmen yang diberikan kepada OPD/K/L masih secara manual, dimana si Pemohon mengantarkan surat permohonan ke Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat, kemudian surat tersebut di disposisi oleh pimpinan, setelah itu baru dapat ditindaklanjuti ke lokasi lapangan sampai dengan penyiapan laporan dan si Pemohon mengambil laporan asesmen ke Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat kembali. Hal ini tentu membutuhkan waktu yang cukup lama.

Berdasarkan permasalahan tersebut, selanjutnya solusi yang ditawarkan yaitu dibentuknya inovasi ABege. ABeGe merupakan inovasi pelayanan publik berbasis non digital dengan memanfaatkan teknologi informasi menggunakan website sebagai media pengiriman surat permintaan asesmen dan pengiriman laporan hasil asesmen. Dengan menerapkan inovasi tersebut pelaksanaan kegiatan asesmen bangunan gedung dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Gambar 6 Tampilan ABeGe Pada Website Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat

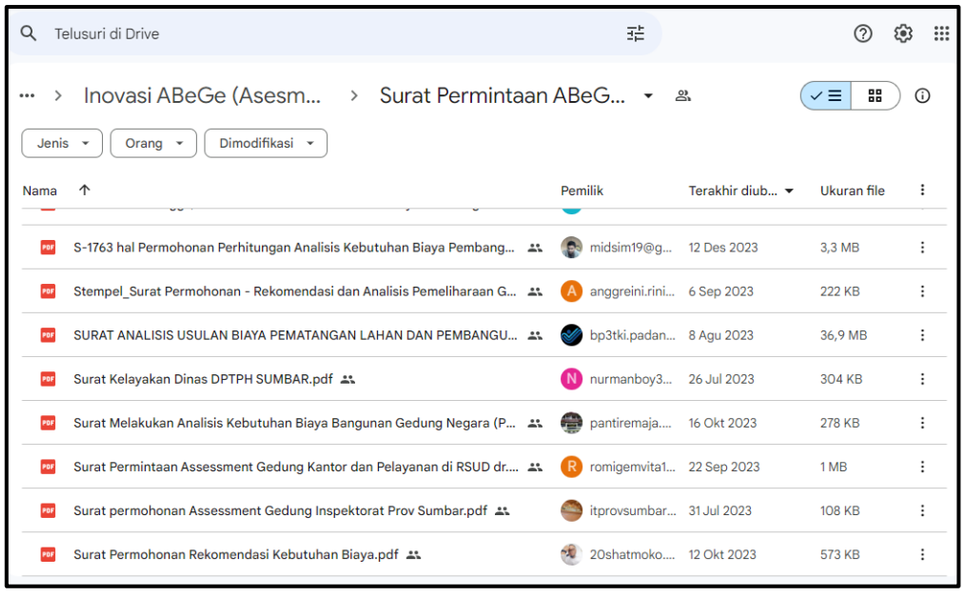

Gambar 7 Surat Masuk Permintaan Asesmen Bangunan Gedung yang Telah Diunggah Oleh Pemohon Melalui ABeGe

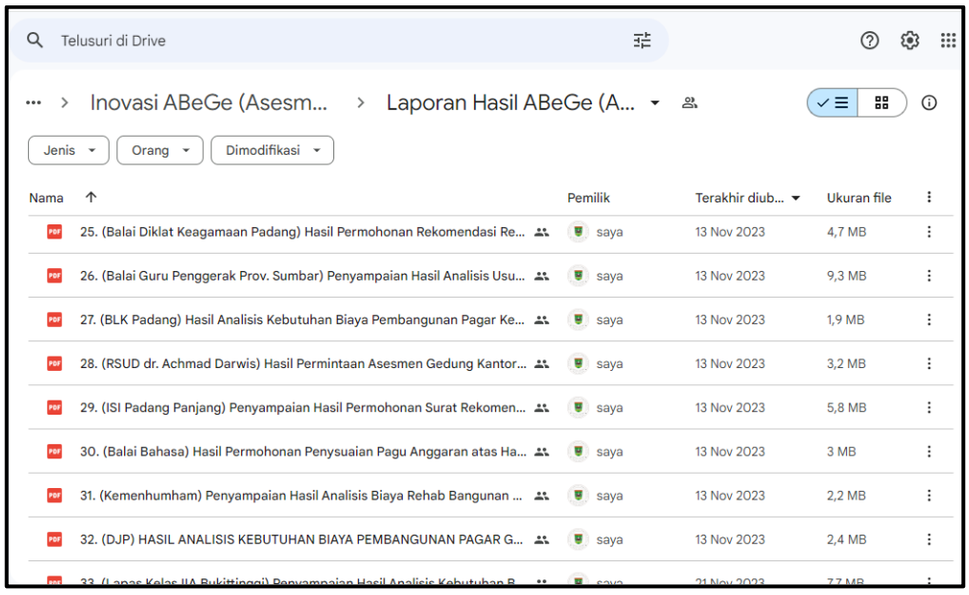

Gambar 8 Laporan Hasil Asesmen yang Dapat Diunduh Oleh Pihak Pemohon Melalui ABeGe

Informasi dari sebagian pengguna ABeGe, terdapat beberapa kelemahan antara lain:

1. ABeGe masih menggunakan *google drive* dalam proses kegiatan asesmen, sehingga para pemohon dapat melihat surat permintaan dan laporan hasil pada pemohon yang lainnya.
2. Pihak pemohon harus melakukan login email terlebih dahulu sebelum mengunggah surat permintaan dan mengunduh laporan hasil asesmen.

3. Tidak adanya pemberitahuan saat pemohon telah mengunggah surat permintaan pada sistem ABeGe, sehingga harus dikonfirmasikan pada *contact person* dahulu.

BAB IV PENUTUP

Laporan Tahunan UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 merupakan cerminan capaian target dalam rangka menunjang tercapainya sasaran strategis pada tahun selanjutnya. Penilaian dilakukan terhadap program dan kegiatan berdasarkan realisasi fisik maupun keuangannya.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugasnya tersebut berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan tercapai dengan baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Program Penataan Bangunan Gedung, Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi, Sub Kegiatan Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi sebesar Rp. 149.533.180,- dengan realisasi anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 146.470.991,- dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 97,95%.
2. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah, Sub Kegiatan Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota sebesar Rp. 321.092.520,- dengan realisasi anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 287.992.352,- dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 89,69%.
3. Hasil pengukuran capaian indikator kinerja *output* pada Sub Kegiatan Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi dengan uraian jumlah asesmen bangunan gedung negara direalisasikan sebanyak 117 dokumen. Dari sasaran dan indikator yang dilaksanakan pada kegiatan ini didapatkan persentase capaian sebesar 234% dengan interprestase melampaui target.

4. Hasil pengukuran capaian indikator kinerja *output* pada Sub Kegiatan Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota dengan uraian jumlah sosialisasi, Bimtek, Workshop dan FGD bangunan gedung negara direalisasikan sebanyak 2 dokumen. Dari sasaran dan indikator yang dilaksanakan pada kegiatan ini didapatkan persentase capaian sebesar 100% dengan interprestase memenuhi target.

LAMPIRAN

Dokumentasi Kegiatan Asesmen Bangunan Gedung Negara

Dokumentasi Kegiatan Asesmen Bangunan Gedung Negara

Dokumentasi Spanduk Kegiatan Bimbingan Teknis Pengawas Konstruksi Bangunan Gedung

Dokumentasi Registrasi Kegiatan Bimbingan Teknis Pengawas Konstruksi Bangunan Gedung

Dokumentasi Acara Pembukaan Kegiatan Bimbingan Teknis Pengawas Konstruksi Bangunan Gedung

Dokumentasi Acara Kegiatan Bimbingan Teknis Pengawas Konstruksi Bangunan Gedung

Dokumentasi Acara Penutupan Bimbingan Teknis Pengawas Konstruksi Bangunan Gedung

Dokumentasi Spanduk Kegiatan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PBG dan SLF

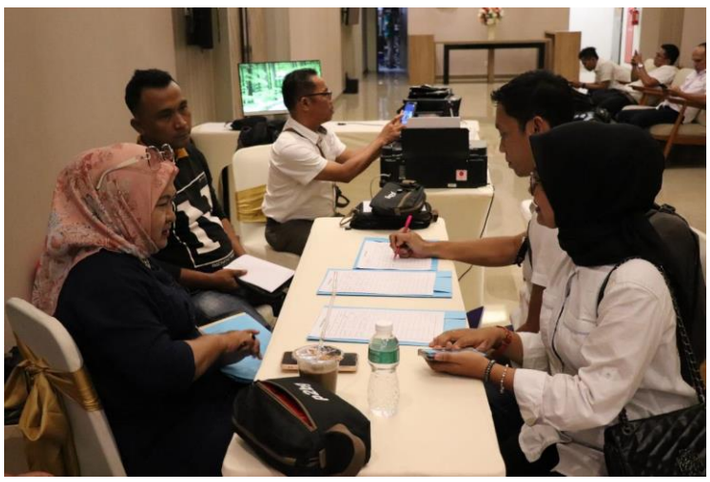

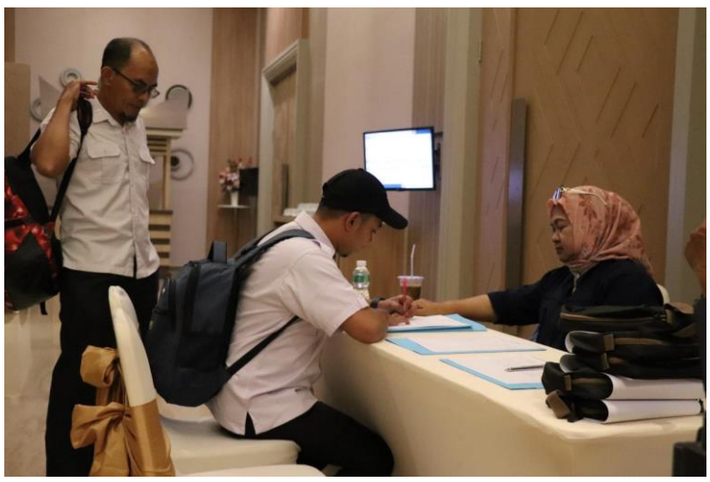

Dokumentasi Registrasi Kegiatan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PBG dan SLF

Dokumentasi Acara Pembukaan Kegiatan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PBG dan SLF

Dokumentasi Acara Kegiatan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PBG dan SLF

Dokumentasi Acara Penutupan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PBG dan SLF